

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi dan informasi dewasa ini telah memberikan dampak positif di beberapa sektor perekonomian, salah satunya adalah di bidang modernisasi periklanan. Modernisasi ini ditandai dengan kemunculan media digital seperti televisi, media sosial, dan *videotron* yang dapat digunakan sebagai sarana periklanan suatu produk oleh pelaku bisnis dan partai politik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas. Kendati demikian, penggunaan media iklan konvensional seperti baliho, *leaflet*, *roundtag*, *shop sign*, dan *billboard* ternyata masih dapat kita temukan dengan mudah di jalanan Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sebagai kota wisata yang menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan tentunya memiliki nilai lebih tersendiri bagi para pelaku periklanan untuk memasarkan produknya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah reklame di Kota Yogyakarta pada 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, data tersebut seperti sebagai berikut.

No	Tahun	Jumlah Reklame
1	2018	433
2	2019	1532
3	2020	877
4	2021	913
5	2022	1186

Tabel 1. 1 Jumlah reklame berizin dari tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta

Keberadaan reklame berizin atau tidak berizin tersebut telah menjadi dilema, disaat reklame tidak berizin telah menghambat pajak pendapatan daerah sedangkan reklame berizin tidak akan merasa bersalah karena akan beralasan memiliki hak karena sudah membayar pajak. Hal ini semakin memperkeruh permasalahan sampah visual sehingga menyebabkan Kota Yogyakarta semakin mengalami pengikisan pada unsur keestetikaan kota dimana taman, jalan, dan berbagai ruang publik lainnya yang seyogyanya dapat dinikmati bersama harus kehilangan fungsinya karena adanya privatisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti politikus dan pelaku usaha yang menggunakan ruang publik sebagai sarana periklanan sehingga dapat menimbulkan sampah visual bagi yang melihatnya (Nazario, 2017).

Dalam menyikapi masalah tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri telah menerbitkan Perwali No. 23 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagai regulasi hukum yang mengatur prosedur penyelenggaraan periklanan di Kota Yogyakarta. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame, ironisnya tetap saja terjadi pelanggaran di lapangan. Iklan-iklan yang beredar baik yang berbayar maupun tidak berbayar seolah-olah saling bersaing agar paling menonjol untuk dilihat, dampak dari persaingan tersebut justru mengakibatkan kesemrawutan di langit-langit kota yang merusak pemandangan bagi setiap orang yang melihatnya (Rahayu, 2014).

“Sayangnya, hingga sekarang Perda No 2 Tahun 2015 tersebut tidak mampu menunjukkan tajinya saat bertarung dengan teroris visual penyebar sampah visual. Teroris visual bekerja secara aman dan bahagia. Setiap hari mereka menyebarkan sampah visual iklan

komersial di ruang publik. Teroris visual pelaku sampah visual iklan komersial, seakan menjadi kelompok penyebar sampah visual yang tidak tersentuh perda yang konon katanya hebat.”(Ivan, dikutip dalam krjogja.com 24/03/2017)

Keberadaan sampah visual tersebut dapat kita temukan dengan di beberapa titik di Kota Yogyakarta seperti di Simpang Pingit, Simpang UKDW, dan *flyover* Simpang Wirobrajan. Keberadaan sampah visual di ruang publik tersebut menunjukkan bahwa penegakkan hukum bagi pelanggar regulasi penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengawal peraturan daerah belum dapat bekerja secara optimal. Padahal keberadaan sampah visual tersebut telah mengikis keindahan dan berpotensi menghambat pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak atas pemasangan iklan di teritorial Kota Yogyakarta.

Atas dasar keprihatinan masalah sampah visual tersebut, muncul beberapa gerakan sosial seperti *Komunitas Reresik Sampah Visual (KRSV)* dan komunitas *Jogja Garuk Sampah (JGS)*. KRSV sendiri digagas oleh seorang Dosen DKV ISI Yogyakarta yaitu Sumbo Tinarbuko yang memiliki tujuan untuk menanamkan rasa keberanian pada individu dalam merespon keberadaan sampah visual. Sedangkan JGS merupakan komunitas yang didirikan oleh Willi Pambudi dimana kelompok ini terjun secara langsung ke lapangan untuk bergerak menindak keberadaan dari sampah visual. *Jogja Garuk Sampah* merupakan sebuah wadah bagi masyarakat yang secara sadar memiliki kepedulian terhadap permasalahan sampah visual dan secara sukarela bergerak untuk melakukan aksi nyata dalam rangka membersihkan

Kota Yogyakarta dari sampah visual yang semakin hari kian bertambah jumlahnya (Nazario, 2017).

Dalam perjalanannya sebagai gerakan sosial di bidang lingkungan, aktivitas komunitas ini sempat terhenti dikarenakan kesibukan Willi yang meninggalkan Kota Yogyakarta karena harus melanjutkan pendidikannya di Bandung. Sampai pada akhirnya Willi menunjuk rekannya bernama Bekti Maulana sebagai koordinator untuk bertugas mengaktifkan kembali komunitas ini agar dapat berjalan seperti sediakala. Berbagai macam dinamika telah dialami oleh Bekti sebagai konsekuensi dirinya yang diamanahi mandat oleh Willian untuk menjadi seorang koordinator, salah satunya adalah menjadi objek sasaran kekerasan oleh pelaku pemasang iklan ilegal yang tidak terima karena iklan yang mereka pasang harus ditertibkan.

Gerakan ini sejatinya telah menunjukkan bagaimana masyarakat mampu bergerak secara mandiri untuk merespon ketidakmasimalan pemerintah dalam mengayomi rakyatnya. Hal tersebut karena gerakan sosial yang dilakukan oleh komunitas *Jogja Garuk Sampah* memanfaatkan jaringan kolektifitas di luar pengaruh negara seperti mahasiswa, rekan komunitas sepeda tinggi, anak muda, dan masyarakat umum sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan peranannya. Meskipun terjadi berbagai dinamika dalam melaksanakan peranannya sebagai gerakan sosial yang bergerak di bidang lingkungan, komunitas ini mampu secara konsisten untuk bergerak selama kurang lebih 6 tahun. Dimana 6 tahun merupakan waktu yang cukup lama bagi suatu komunitas organik yang bergerak secara swadaya tanpa memiliki tujuan untuk mencari keuntungan materialistik.

Memahami fakta bahwa permasalahan sampah visual merupakan permasalahan yang pelik, ditambah dengan minimnya kesadaran dan kepedulian dari pemerintah dan masyarakat mengenai masalah sampah visual membuat sekelompok pemuda menginisiasi dibentuknya komunitas *Jogja Garuk Sampah* sebagai gerakan sosial kemasyarakatan dan wadah bagi masyarakat yang memiliki kepedulian akan keberadaan sampah visual di Kota Yogyakarta. Perjalanan dari komunitas ini pun tidak selamanya berjalan dengan mulus, berbagai dinamika telah terjadi baik karena faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas peneliti akan menulis sebuah penelitian dengan memfokuskan penelitiannya pada peran dan langkah komunitas *Jogja Garuk Sampah* dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sampah visual di Kota Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran dan taktik yang dilakukan oleh komunitas *Jogja Garuk Sampah* dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sampah visual di Kota Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran taktik yang dilakukan oleh komunitas *Jogja Garuk Sampah* dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sampah visual di Kota Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian ini memiliki tiga manfaat yaitu teoritis, praktis, dan manfaat bagi peneliti yang selanjutnya akan dijelaskan seperti sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi dalam pengembangan pengetahuan serta menambah wawasan khususnya tentang penanganan sampah visual.

2. Manfaat Praktis

Dengan diadakannya penelitian ini harapannya dapat menambah wawasan penulis mengenai peran gerakan sosial dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sampah visual.

1.5. Tinjauan Pustaka

No	Penulis	Judul	Review
1.	(Rahayu, 2014)	Komunitas Reresik Sampah Visual: Membangun Kesadaran Baru Tata Visual Iklan Media Luar Griya Di Yogyakarta.	Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada Komunitas Reresik Sampah Visual dalam upayanya membangun kesadaran baru terkait pentingnya menciptakan ruang visual media luar griya yang baik.
2.	(Nazario, 2017)	Sampah Visual Pada Ruang Publik (Studi	Penelitian ini membahas tentang hubungan antara

No	Penulis	Judul	Review
		Community Relation Tentang Sampah Visual Pada Ruang Publik Di Yogyakarta Pada Tahun 2017-2018).	komunitas yang lahir dari masyarakat, dan mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap privatisasi ruang publik yang notabene merupakan ruang yang seharusnya menjadi milik bersama.
3.	(Parmudi, 2015)	Kebangkitan Civil Society Di Indonesia	Penelitian ini membahas tentang Kebangkitan civil society yang diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis gerakan sosial. <i>Pertama</i> , resistensi simbolik yang meliputi pelbagai aksi tidak langsung untuk mengontrol dominasi negara. <i>Kedua</i> , resistensi pragmatis yang dilakukan sebagai reaksi langsung terhadap kebijaksanaan pemerintah atau sistem sosial-ekonomi-politik yang sedang berjalan. <i>Ketiga</i> , resistensi simbolik-pragmatis yang merupakan aksi langsung maupun tidak langsung yang menuntut terciptanya situasi sosial-politik yang lebih baik.
4.	(Pradika, 2022)	Gerakan Sosial Baru Rakyat Bantu Rakyat : Studi Kasus Peran Dapur Umum Buruh Gendong Perempuan Yogyakarta di Tengah Pandemi Covid-19	Penelitian ini membahas tentang gerakan Dapur Umum Buruh Gendong Perempuan di Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19. Gerakan swadaya yang dilakukan masyarakat ini sebagai bentuk kritikan terhadap negara yang tidak maksimal dalam penanganan pandemi Covid-19.
5.	(Amrurobbi, 2021)	Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang:	Penelitian ini membahas tentang model kampanye konvensional seperti

No	Penulis	Judul	Review
		Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada <i>Waste Problems of Outdoor Media Visual: Review of General</i>	penggunaan baliho, poster, banner, dsb menciptakan sampah visual yang mengganggu keindahan dan lingkungan hidup.
6.	(Fitriani, 2017)	Gerakan Peduli Lingkungan: Studi Pada Komunitas <i>Jogja Garuk Sampah</i> Di Kota Yogyakarta	Penelitian ini membahas tentang Komunitas <i>Jogja Garuk Sampah</i> yang memiliki kepedulian terhadap masalah sampah visual di kota Yogyakarta.
7.	(Prawira, 2017)	Reklame: Sampah Visual Di Kotamadya Yogyakarta (Dilihat Dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2015)	Penelitian ini membahas tentang keberadaan sampah visual yang disebabkan dari reklame-reklame yang menumpuk terlalu banyak lalu ditambah lagi dengan bentuk fisik dari iklan-iklan komersil yang tidak sesuai ukurannya, warna, proporsi, lokasi dimana ditempatkan, penggunaan huruf maupun kalimat, dan sebagainya.
8.	(Khatami, 2021)	Eksistensi “Baliho 2024” Dalam Pertarungan Elektabilitas: Analisis Pencitraan Tokoh Politik	Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kemunculan Baliho 2024 dianggap tidak tepat karena dinilai tidak bersimpati dengan kondisi krisis masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19.
9.	(Andu & Hardiyanti, 2019)	Pengaruh Baliho Terhadap Pilihan Politik Masyarakat Kelas Menengah Pada Pilkada di Kota Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan politik masyarakat kelas menengah tidak tergantung atau sepenuhnya berdasarkan baliho, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% informan mengatakan pilihan politik mereka dipengaruhi oleh rekam

No	Penulis	Judul	Review
			jejak kandidat yang bersangkutan, kemampuan, dan prestasi yang pernah dihasilkan.
10.	(Azizah, 2016)	Gerakan Reresik Sampah Visual Sebagai Gerakan Sosial Baru (Studi Kasus Komunitas Reresik Sampah Visual Merebut Kembali Ruang Publik di Kota Yogyakarta)	Hasil dari penelitian ini adalah Komunitas Reresik Sampah Visual yang telah merefleksikan sebagai gerakan sosial baru. Hal tersebut dibuktikan melalui strategi yang digunakan dalam rangka merebut ruang publik di Kota Yogyakarta dari invasi sampah visual.

Tabel 1. 2 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Keberadaan komunitas sebagai representasi gerakan sosial yang bergerak dalam gerakan lingkungan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih sadar dan peduli dalam menanggapi permasalahan lingkungan. *Kedua*, Penggunaan media iklan konvensional sebagai saran periklanan cenderung memberikan dampak negatif, sebab dengan jumlahnya yang tidak terkontrol dan letaknya yang sembarang telah menyebabkan buruknya nilai keestetikaan, rusaknya ruang publik, dan kerusakan ekologis dari ruang terbuka publik perkotaan.

Hal yang membedakan dari studi sebelumnya, penelitian ini akan membahas dinamika dan respon masyarakat pada komunitas *Jogja Garuk Sampah* (JGS) dalam perjalanannya sebagai gerakan sosial kemasyarakatan yang fokus bergerak dalam merespon permasalahan sampah visual di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan di masa mendatang.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Gerakan Sosial Baru

Menurut Macionis (1999) gerakan sosial merupakan bagian dari perilaku kolektif dimana terdapat aktivitas terorganisir yang memiliki tujuan untuk suatu perubahan sosial. Gerakan sosial terjadi karena adanya ketidakmampuan institusi negara untuk bekerja secara optimal dalam suatu permasalahan sehingga mendorong masyarakat yang memiliki kepedulian pada suatu isu untuk bergerak secara swadaya untuk melakukan perubahan. Di Indonesia, pada umumnya pemetaan kerangka analisis studi-studi gerakan sosial berkiblat kepada pandangan Rajendra Singh.

Menurut Singh (dalam Sukmana, 2016) pemetaan teoritik gerakan sosial pada umumnya diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

1. Klasik, tradisi ini muncul pada tahun sebelum 1950an dimana sebagian tindakan perilaku kolektif diarahkan pada bentuk perilaku kelompok kerumunan yang disebut dengan *crowd* yang diwujudkan melalui beberapa tindakan seperti; kerusuhan (*revolts*), huru-hara (*mob*), keributan dan kerisauan (*riots*), hingga pada pemberontakan (*rebels*)
2. Neo-Klasik, tulisan dalam tradisi ini mayoritas dipublikasikan pada tahun 1950an, dimana tradisi ini dibagi menjadi dua model gerakan sosial lama yaitu fungsional dan dialektika marxis.

3. Gerakan Sosial Baru, gerakan ini muncul pada tahun 1960an sebagai respon masyarakat Eropa dan Amerika akibat adanya gerakan berskala besar yang mengangkat isu *humanist, cultural, dan non-materialistic*.

Selanjutnya, menurut Singh (2010) Gerakan Sosial Baru atau *New Social Movement* merupakan gerakan transnasional yang memiliki tujuan untuk berjuang dan menyuarakan isu-isu mendasar dalam kehidupan manusia seperti kemanusiaan, persamaan hak, lingkungan, kebebasan masyarakat sipil, dan perdamaian. Pandangan tersebut diperkuat oleh pendapat Joe Fowerker (dalam Wahyudin, 2018), menurutnya gerakan sosial baru terbentuk akibat adanya keluhan pada masyarakat yang menuntut adanya perubahan. Dalam konteks kehidupan masyarakat di Amerika Latin, keluhan tersebut terjadi akibat dari gagalnya pembangunan, represifitas militer, penolakan kebijakan populis yang mendorong para aktor untuk membangun gerakan sosial. Adanya keluhan tersebut menjadi relevan dalam membahas suatu kemunculan gerakan sosial, sebab setiap keluhan baru yang muncul akan memicu terciptanya suatu gerakan.

Gerakan sosial ini dikatakan baru karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movements*). Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tujuan dan corak gerakan sosial tersebut, apabila gerakan sosial lama memiliki tujuan yang cenderung bersifat ekonomis materialistik dan corak perjuangannya berdasarkan kelas sedangkan gerakan sosial baru cenderung menitikberatkan pada non materialistik dan bersifat inklusif bagi golongan manapun.

Menurut Singh (2010) dalam bukunya yang berjudul “Gerakan Sosial Baru” suatu gerakan sosial memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Gerakan sosial baru tidak bertumpu pada pandangan kaum marxian yang menganggap bahwa mobilisasi dan perjuangan didasarkan pada pengelompokan kelas. Dimana keberadaan dari gerakan sosial tidak dimaknai kembali sebagai alat untuk menjatuhkan kekuasaan di suatu negara, melainkan sebagai mitra negara dalam mewujudkan perubahan.
2. Pengorganisasian dan taktik yang digunakan lebih menekankan pada taktik yang mampu mempengaruhi opini publik untuk mendapatkan simpati.
3. Para pelaku dalam gerakan sosial baru pada umumnya berasal dari golongan masyarakat menengah dan lazimnya merupakan kaum terdidik.

Dalam rangka memperdalam riset penelitian, peneliti akan menggunakan pendekatan yang terdapat dalam cabang teori gerakan sosial baru yaitu:

- Teori Mobilisasi Sumber Daya

Menurut Sukmana (2016) Pendekatan Mobilisasi Sumber Daya adalah pendekatan yang fokus pada proses mobilisasi masyarakat dimana gerakan tersebut memiliki tujuan dan perencanaan. Dikarenakan ciri dari gerakan sosial baru yang gerakannya bersifat inklusif tanpa memandang latar belakang kelas, suatu gerakan sosial dapat memanfaatkan sumber daya yang berasal dari internal (anggota komunitas) maupun eksternal (non anggota komunitas) sebagai sumber daya manusia untuk melaksanakan tujuannya.

Pendekatan ini juga didukung oleh beberapa tokoh seperti Zald & McCarthy dan Anthony Oberschall, menurut Zald & McCarthy (1977) struktur mobilisasi merupakan cara yang digunakan gerakan sosial untuk melebur dalam suatu aksi kolektif dengan cara memasukkan unit keluarga, jaringan pertemanan, dan relawan ke dalam struktur mobilisasi mikro. Sedangkan menurut Oberschall (dalam Sukmana, 2016) pendekatan ini beranggapan bahwa pentingnya faktor mobilisasi terletak pada beberapa elemen yaitu:

1. Komunikasi, komunikasi merupakan salah satu kunci penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Melalui proses komunikasi seseorang dapat menyampaikan informasi atau pesan kepada individu yang lain. Dengan komunikasi yang baik akan dapat menciptakan kelompok yang solid dan terorganisir.
2. Keberadaan anggota, keberadaan anggota merupakan suatu kewajiban dari adanya suatu kelompok. Tanpa kehadiran anggota, suatu kelompok akan kesulitan dalam melaksanakan kegiatannya sebab anggota memiliki peranan sebagai sumber daya utama dalam keberlangsungan suatu kelompok dalam menjalankan peranannya sebagai gerakan sosial.
3. Kepemimpinan, dalam menjalankan suatu kelompok atau gerakan perlu adanya seorang pemimpin. Keberadaan pemimpin akan memudahkan proses mobilisasi anggota untuk bergerak sesuai dengan tujuan dari suatu kelompok.
4. Partisipasi, partisipasi masyarakat dalam suatu gerakan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari suatu kelompok gerakan sosial. Sebab

organisasi yang memiliki tujuan positif pada hakikatnya akan senantiasa menarik perhatian masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan

1.6.2. Ruang Publik

Habermas mengenalkan gagasan mengenai ruang publik dalam bukunya yang berjudul *Strukturwandel der Öffentlichkeit; Untersuchungen zu einer Kategorie der Bürgerlichen Gesellschaft*. Ruang Publik menurut Habermas (1991) dapat diartikan sebagai ruang masyarakat privat yang berkumpul membentuk suatu kelompok untuk mendiskusikan suatu permasalahan. Habermas menceritakan bahwa awal mula terbentuknya ruang publik terjadi sejak abad ke-18 di Prancis dan Inggris dimana muncul fenomena orang-orang yang berkumpul di *coffee houses* untuk berdiskusi mengenai persoalan karya seni hingga ekonomi dan politik. Melalui budaya diskusi tersebut terbentuk kebiasaan di masyarakat untuk berpikir kritis dalam merespon suatu permasalahan di suatu wilayah.

Ruang Publik sendiri diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu ruang publik luar (*out door public space*) dan ruang publik dalam (*indoor public space*) (Huat, 1979). Ruang publik luar adalah area publik yang letaknya berada di luar ruangan seperti taman, jalan, lapangan, pedestrian, dan lain sebagainya. Sedangkan ruang publik dalam adalah ruang publik yang letaknya dapat ditemukan di dalam ruangan seperti tempat perbelanjaan dan fasilitas pelayanan publik.

Habermas (dalam Prasetyo, 2012) mengungkapkan bahwa ruang publik memainkan peran yang vital dalam penguatan demokrasi, sebab ruang publik menjadi jembatan penghubung antara negara dengan masyarakat sipil. Oleh karena

itu keberadaan ruang publik harus berisikan masyarakat privat yang terbebas dari kendali pemerintah sehingga dapat membentuk suatu konsensus sosial yang bebas dari intervensi oleh pihak manapun. Namun yang terjadi saat ini di ruang publik adalah kemunculan fenomena privatisasi ruang publik yang dilakukan oleh beberapa pihak yang memiliki motif kepentingan ekonomi dan politik. Pemanfaatan pohon dan trotoar sebagai media periklanan ilegal pada *outdoor public space* oleh suatu golongan telah menjadi penyebab kesemrawutan pada tata ruang kota.

Kesemrawutan yang terjadi tentunya telah membuat keberadaan ruang publik yang diprivatisasi untuk kepentingan pribadi menyebabkan ketidaknyamanan bagi publik. Padahal menurut Darmawan (2007) salah satu elemen untuk menilai kualitas dari keberadaan ruang publik adalah elemen kerapian dan kenyamanan. Berdasarkan kriteria tersebut, keberadaan dari iklan ilegal yang dipasang secara sewenang-wenang tentunya telah merusak elemen kerapian pada tata ruang kota, sehingga berdampak pada ketidaknyamanan bagi masyarakat saat mengakses ruang publik itu sendiri.

1.6.3. Sampah Visual

Istilah sampah visual pertama kali diperkenalkan oleh Jean Baudrillard, Baudrillard merupakan seorang pemikir asal Perancis yang memiliki perhatian terhadap budaya konsumerisme masyarakat di era kontemporer. Menurut Baudrillard (2002) sampah visual adalah kebiasaan yang dilakukan oleh pemodal besar (kapitalis) yang memasarkan produk yang dijualnya di pinggiran jalan dengan menggunakan media berupa spanduk dan banner yang menyebabkan ketertindasan.

Selanjutnya di Indonesia sendiri terdapat seorang tokoh yang memiliki konsen di permasalahan sampah visual, beliau adalah Sumbo Tinarbuko yang merupakan Dosen DKV ISI Yogyakarta. Menurut Tinarbuko (dalam Rahayu, 2014) mendefinisikan sampah visual sebagai iklan media luar ruang yang diletakkan di tempat strategis perkotaan yang berjubel dan saling menimpa sehingga menimbulkan kesemrawutan bagi yang melihatnya. Keberadaan sampah visual ini dapat berpotensi menyebabkan buruknya nilai keestetikaan, rusaknya ruang publik, dan kerusakan ekologis dari ruang terbuka publik perkotaan

Dalam mengidentifikasi iklan yang berpotensi menjadi sampah visual, Sumbo memperkenalkan prinsip dasar yang disebut “5 Sila Reresik Sampah Visual”. Prinsip tersebut dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat yang memiliki kesadaran dalam menertibkan iklan-iklan yang sifatnya mengganggu ketertiban umum. Menurut Tinarbuko (dalam Rahayu, 2014) isi dari 5 Sila Reresik Sampah Visual seperti sebagai berikut:

1. Iklan tidak boleh dipasang di trotoar
2. Iklan tidak boleh dipasang di taman kota atau ruang terbuka hijau
3. Iklan tidak boleh dipasang di berbagai macam tiang seperti tiang listrik, telepon, dan lain sebagainya
4. Iklan tidak boleh dipasang di tembok atau bangunan *heritage*
5. Iklan tidak boleh dipasang/diikat/dipaku di batang pohon

1.7. Definisi Konseptual

Berdasarkan kerangka teori di atas, peneliti akan menentukan beberapa definisi konseptual seperti sebagai berikut:

1.7.1. Gerakan Sosial Baru

Gerakan Sosial Baru atau *New Social Movements* merupakan gerakan yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak mendasar dalam kehidupan manusia, dimana dalam menjalankan peran tersebut gerakan ini menggunakan taktik yang dapat mempengaruhi opini masyarakat untuk mendapatkan simpati. Dalam melancarkan aktivitasnya tersebut gerakan ini melakukan proses mobilisasi sumber daya manusia dengan memanfaatkan jaringan lingkungan terdekat.

1.7.2. Ruang Publik

Ruang publik merupakan suatu ruang atau wilayah yang pada hakikatnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya dominasi yang dilakukan oleh sekelompok orang bahkan pemerintah itu sendiri yang dapat mengganggu kenyamanan bagi para penggunanya.

1.7.3. Sampah Visual

Sampah visual merupakan iklan luar griya yang dipasang di tempat yang tidak sesuai dengan fungsinya sehingga akan menimbulkan kesemrawutan di suatu kawasan bagi yang melihatnya.

1.8. Definisi Operasional

Menurut Singarimbun & Effendi (1982) definisi operasional dapat dipahami sebagai petunjuk dalam mengukur suatu variabel agar memudahkan penelitian di lapangan sehingga dalam operasionalisasi konsep-konsep yang akan digunakan dapat menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diketahui

kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori gerakan sosial baru sebagai alat untuk mengukur variabel yang akan diteliti.

No	Variabel	Indikator
1.	Peran dan Taktik Gerakan Sosial (Singh, 2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya dalam membangun kesadaran masyarakat. 2. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana dokumentasi dan edukasi. 3. Pemilihan lokasi strategis sebagai taktik untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. 4. Menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
	Mobilisasi Sumber Daya (Zald & McCarthy, 1977)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara rekrutmen keanggotaan. 2. Pemanfaatan jaringan pertemanan dalam melakukan gerakan sosial.

Tabel 1. 3 Definisi Operasional

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Menurut (Herdiansyah, 2010) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks *social* secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Metode ini efektif untuk mengetahui informasi atau fenomena yang telah dialami oleh narasumber secara mendalam. Fenomena-fenomena tersebut dapat berupa motivasi, tindakan, persepsi dan lain sebagainya yang disampaikan melalui proses interaksi antara peneliti dan narasumber. Data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif berupa data deskriptif seperti ucapan, atau tulisan dari narasumber yang telah diamati (Bogdan & Taylor, 1992).

1.9.2. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2006) data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dimana sumber data merupakan pelaku yang secara sadar terlibat langsung dalam fenomena yang sedang diteliti. Data primer dapat dikumpulkan melalui narasumber yang merupakan pelaku utama atau yang terlibat secara langsung dalam kegiatan yang sedang diteliti.

2. Data Sekunder

Menurut (Mahmud, 2011) Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber-sumber terdahulu. Data Sekunder dapat diperoleh dari jurnal, skripsi, dan berita online. Data sekunder yang sesuai dengan tema yang diteliti akan digunakan oleh peneliti untuk memperkuat data primer.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data penelitian yang akurat dan spesifik.

1. Wawancara

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut Sugiyono dalam (Chan et al., 2019) menjelaskan bahwa wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dari sumber data yang bertujuan untuk mengetahui suatu permasalahan secara lebih mendalam. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan sumber langsung dari pihak yang terlibat untuk mendukung validitas dari penelitian yang dilaksanakan.

No	Instansi	Jabatan	Jumlah
1.	<i>Jogja Garuk Sampah</i>	Koordinator	1
2.	Satpol-PP Kota Yogyakarta	Kepala Seksi Pengendalian Operasional	1

		SATPOL-PP Kota Yogyakarta	
3.	Persatuan Pengusaha Periklanan Cabang Yogyakarta	Sekretaris Jenderal	1
4.	Masyarakat	Masyarakat	1

Tabel 1. 4 Daftar Narasumber

2. Dokumentasi

Menurut (Abdussamad, 2021) dokumentasi adalah bukti data yang relevan untuk menunjang validitas penelitian, data-data tersebut dapat berupa catatan, surat kabar, foto, video, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh peneliti berupa berita dan foto kegiatan dari Komunitas *Jogja Garuk Sampah*.

1.9.4. Teknik Analisis Data

Menurut (Abdussamad, 2021) Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif Miles & Huberman (dalam Abdussamad, 2021). Teknik analisis data ini memiliki tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi data

Dalam penelitian akan menghasilkan berbagai macam data yang kompleks dan rumit, banyaknya data tersebut perlu dipilah melalui proses reduksi. Reduksi merupakan usaha untuk merangkum, memilah, dan memfokuskan pada hal yang diteliti. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang akan memudahkan peneliti untuk melanjutkan penelitian ke tahapan selanjutnya.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan membuat uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pada umumnya, penyajian data pada penelitian kualitatif berbentuk uraian singkat.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam tahap ini dilakukan penarikan dan verifikasi data berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Selanjutnya dilakukan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

1.9.5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi fokus penelitian adalah Kota Yogyakarta yang letaknya berada di tengah-tengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota

Yogyakarta memiliki luas wilayah sebesar 3.250 ha atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berada di ketinggian kurang dari 114 meter di atas permukaan air laut